



Transformasi Sistem Politik Indonesia dalam Bayang-Bayang Sentralisasi Kekuasaan dan Politik Elit

Hani Nurul Qhotimah ^{1*}, Indah Rahma Dani ², Jasuar Aliyyu Khatta ³

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Penulis Korespondensi: haninurulqhotimah2@gmail.com, irahmadani674@gmail.com,
imjsr2007@gmail.com

Abstract. Indonesia's political system has undergone significant transformation, particularly since the transition from authoritarianism to democracy in the late 20th century. Despite the formal shift toward decentralization and democratic governance, patterns of power centralization and elite dominance remain influential in shaping political outcomes. This study aims to examine how these two dynamics centralization of authority and elite-driven politics interact within Indonesia's evolving political system. Using a qualitative approach based on literature review and critical analysis, this research explores institutional developments, policy trends, and political behavior across different periods. The findings indicate that although decentralization policies were introduced to distribute power more evenly, in practice, political authority often reconsolidates at the national level through regulatory frameworks and elite networks. Furthermore, political elites continue to play a decisive role in controlling party structures, electoral processes, and policy directions, limiting broader public participation. These conditions create a paradox in which democratic procedures exist, but substantive democracy remains constrained. The study implies that strengthening institutional accountability, enhancing political inclusivity, and reducing oligarchic influence are essential steps toward achieving a more balanced and representative political system in Indonesia.

Keywords: centralization; democracy; elite politics; Indonesia; political system

Abstrak. Transformasi sistem politik Indonesia menunjukkan perubahan yang cukup mendasar sejak berakhirnya rezim otoriter menuju sistem yang lebih demokratis. Namun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghapus praktik sentralisasi kekuasaan dan dominasi elit dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dinamika sentralisasi kekuasaan dan politik elit tetap bertahan dan berinteraksi dalam perkembangan sistem politik Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka serta analisis kritis terhadap berbagai literatur dan fenomena politik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi telah diterapkan untuk mendistribusikan kekuasaan ke daerah, dalam praktiknya terjadi kecenderungan resentralisasi melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan peran pemerintah pusat. Di sisi lain, elit politik masih memegang kendali besar dalam menentukan arah kebijakan, menguasai struktur partai, serta mempengaruhi proses pemilihan umum. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara prosedur demokrasi yang berjalan secara formal dengan kualitas demokrasi yang masih terbatas secara substantif. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, serta pembatasan dominasi elit agar sistem politik Indonesia dapat berkembang lebih inklusif dan representatif.

Kata kunci: demokrasi; Indonesia; politik elit; sentralisasi; sistem politik

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar yang terjadi sejak berakhirnya pemerintahan otoriter menuju era reformasi. Pada fase ini, Indonesia berupaya membangun sistem yang lebih terbuka melalui demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Secara normatif, langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan di tingkat pusat sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, proses transformasi ini tidak berjalan sepenuhnya linier (Gunawan, 2026). Di satu sisi, terjadi pelembagaan mekanisme

demokrasi seperti pemilihan umum yang lebih kompetitif dan kebebasan berpendapat yang relatif meningkat. Di sisi lain, pola-pola lama terkait dominasi elit dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan masih tetap bertahan, bahkan dalam bentuk yang lebih halus.

Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia seringkali menghadapi persoalan implementasi. Beberapa penelitian menilai bahwa otonomi daerah justru melahirkan elit-elit lokal yang memiliki kekuasaan besar di wilayahnya masing-masing, tanpa diimbangi dengan mekanisme kontrol yang kuat. Sementara itu, studi lain menyoroti adanya kecenderungan pemerintah pusat untuk kembali menarik sebagian kewenangan strategis melalui regulasi tertentu, sehingga memperlihatkan gejala resentralisasi (Sihombing et al., 2024). Dalam konteks ini, politik tidak hanya dijalankan melalui institusi formal, tetapi juga melalui jaringan kekuasaan yang melibatkan aktor-aktor elit baik di tingkat nasional maupun daerah.

Fenomena politik elit menjadi semakin relevan ketika melihat bagaimana proses pengambilan keputusan publik kerap didominasi oleh segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Partai politik, yang seharusnya menjadi saluran aspirasi masyarakat, dalam banyak kasus justru dikuasai oleh elit tertentu yang menentukan arah kebijakan dan strategi politik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana demokrasi yang berjalan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, atau justru sekadar menjadi arena kompetisi antar elit (Sotya et al., 2022).

Di titik inilah muncul celah kajian yang perlu diperhatikan. Banyak penelitian telah membahas desentralisasi atau politik elit secara terpisah, tetapi belum cukup mendalam dalam melihat bagaimana keduanya saling berkelindan dalam membentuk arah transformasi sistem politik Indonesia. Padahal, interaksi antara sentralisasi kekuasaan dan dominasi elit dapat menghasilkan dinamika yang kompleks, termasuk munculnya bentuk-bentuk kekuasaan baru yang tidak selalu terlihat secara eksplisit (Fajriyah et al., 2025).

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara lebih kritis bagaimana transformasi sistem politik Indonesia berlangsung di tengah tarik-menarik antara desentralisasi formal dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan, serta bagaimana peran elit politik memengaruhi proses tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami pola hubungan antara struktur kekuasaan dan aktor politik, sekaligus mengidentifikasi implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia (Bustomi et al., 2025). Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya perspektif mengenai perkembangan sistem politik Indonesia yang tidak hanya dilihat dari aspek institusional, tetapi juga dari dinamika kekuasaan yang bekerja di baliknya.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Hegemoni dan Relasi Kuasa

Teori Hegemoni Antonio Gramsci menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana elit kekuasaan tidak hanya menggunakan instrumen paksaan (*coercion*), tetapi juga konsensus (*consent*). Sentralisasi kekuasaan saat ini seringkali dimanifestasikan melalui narasi pembangunanisme dan stabilitas nasional yang diterima oleh publik sebagai sesuatu yang niscaya. Secara teoritis, ketika kekuasaan mulai memusat, terjadi proses "penjinakan" terhadap lembaga-

lembaga kritis melalui regulasi yang tampak teknokratis namun bermuatan politis. Hal ini menciptakan kondisi di mana kebijakan negara seolah-olah lahir dari kebutuhan objektif masyarakat, padahal merupakan produk dari negosiasi elit di ruang tertutup (Timur Tumanggor, 2025).

B. Formalisme Hukum dan *Autocratic Legalism*

Fenomena yang terjadi di Indonesia dapat dianalisis melalui konsep *Autocratic Legalism* yang diperkenalkan oleh Kim Lane Scheppele. Teori ini menjelaskan bagaimana pemimpin yang memiliki kecenderungan sentralistik menggunakan cara-cara yang sepenuhnya legal seperti revisi undang-undang atau pembuatan aturan baru untuk melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Sentralisasi tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan "penguatan sistem" melalui jalur konstitusional (Iriyani Astuti Arief, Indra Lestari, 2023). Kajian ini melihat bahwa penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (*rule by law*) telah menggeser esensi supremasi hukum (*rule of law*), di mana independensi lembaga yudikatif dan pengawas perlahan tergerus oleh dominasi eksekutif yang didukung penuh oleh kekuatan legislatif yang hegemonik.

C. Dinamika *Coalition-Building* dan Politik Kartel

Memperdalam pandangan Slater (2004) mengenai *protection pacts*, sistem politik Indonesia saat ini terjebak dalam pola koalisi besar yang mematikan fungsi oposisi. Secara teoritis, Politik Kartel mengakibatkan hilangnya akuntabilitas vertikal (rakyat ke pemerintah) karena semua aktor politik utama berada dalam satu barisan kepentingan yang sama untuk membagi sumber daya negara (*rent-seeking*). Kajian ini mendalilkan bahwa ketika partai politik kehilangan fungsi representasi dan hanya menjadi perpanjangan tangan elit, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat eksklusif (Sony Eko Adisaputro, 2020). Akibatnya, transformasi sistem politik tidak lagi mengarah pada pendewasaan demokrasi, melainkan pada penguatan struktur oligarki yang bersifat predatoris terhadap akses ekonomi dan politik.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, secara konsisten menyoroti tren kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) di Indonesia melalui pelemahan KPK dan pembatasan kebebasan berpendapat. Namun, sebagian besar literatur tersebut masih berfokus pada perilaku aktor politik secara individual. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, di mana fokus diarahkan pada mekanisme struktural sentralisasi yang terjadi melalui sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah (Nur Rahmad Teguh Septiyadi, 2025). Masih terdapat ruang akademik yang belum terisi secara maksimal mengenai bagaimana transformasi ini secara spesifik mengubah peta jalan kebijakan publik yang awalnya desentralistik menjadi kembali ke pola komando pusat (neo-sentralisme) (Ridoi, 2024).

Kerangka berpikir bahwa penguatan posisi elit politik yang terorganisir dalam pola kartel secara linear akan mendorong terjadinya sentralisasi kekuasaan. Hal ini dikarenakan kontrol yang terpusat lebih memudahkan proses distribusi konsesi politik di antara anggota elit. Oleh karena itu, transformasi sistem politik Indonesia saat ini cenderung menunjukkan arah regresif, di mana prosedur demokrasi tetap dipertahankan secara formal, namun secara substansi terjadi

pemusatan otoritas yang membatasi ruang kontrol dari masyarakat sipil dan lembaga pengawas independent (Harun Ni'am, Ismiyatun, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada pemahaman mendalam terhadap dinamika sistem politik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan peran elit politik. Melalui desain ini, peneliti berupaya menafsirkan berbagai fenomena politik tidak hanya sebagai peristiwa yang tampak di permukaan, tetapi juga sebagai bagian dari pola kekuasaan yang lebih luas (Sugiyono, 2020).

Objek dalam penelitian ini tidak berupa populasi dalam arti statistik, melainkan berupa fenomena politik yang tercermin dalam kebijakan, praktik kelembagaan, serta perilaku aktor politik di Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan data dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi sumber terhadap fokus penelitian. Sumber data utama berasal dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem politik, desentralisasi, dan politik elit di Indonesia (Dinata, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik, kemudian menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti sentralisasi kekuasaan, desentralisasi, serta dominasi elit politik. Dalam proses ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berperan dalam mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengkaji data secara kritis (Heryana, 2020).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan disederhanakan untuk menemukan pola, kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dengan cara mengaitkan temuan-temuan yang ada dengan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya.

Model penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat konseptual, yang menggambarkan hubungan antara sentralisasi kekuasaan sebagai variabel struktural dan politik elit sebagai variabel aktor. Sentralisasi kekuasaan dalam hal ini dipahami sebagai tingkat konsentrasi kewenangan pada pemerintah pusat, sedangkan politik elit merujuk pada dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Kedua variabel tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan kualitas sistem politik Indonesia sebagai variabel hasil (Siregar et al., 2022).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keterandalan yang cukup baik karena didukung oleh sumber-sumber akademik yang kredibel. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil analisis mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Penelitian, ditemukan bahwa transformasi sistem politik Indonesia tidak sepenuhnya bergerak ke arah desentralisasi yang ideal. Meskipun secara formal kewenangan telah didistribusikan kepada pemerintah daerah, dalam praktiknya terdapat kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat melalui regulasi dan kebijakan strategis. Hal ini menunjukkan adanya pola resentralisasi yang berjalan secara bertahap dan tidak selalu disadari. Untuk memperjelas temuan tersebut, berikut disajikan ringkasan pola hubungan antara sentralisasi kekuasaan dan politik elit dalam sistem politik Indonesia (Pora et al., 2025).

Tabel 1. Pola Hubungan Sentralisasi Kekuasaan dan Politik Elit

Aspek	Temuan Utama
Distribusi Kekuasaan	Kewenangan formal tersebar, tetapi kontrol strategis tetap di pusat
Peran Elit Politik	Dominasi elit dalam partai dan pengambilan keputusan
Mekanisme Demokrasi	Prosedural berjalan, namun partisipasi substantif masih terbatas
Hubungan Pusat-Daerah	Terjadi tarik-menarik antara desentralisasi dan resentralisasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mendistribusikan kekuasaan, peran elit politik tetap menjadi faktor dominan dalam menentukan arah kebijakan. Dalam hal ini, elit tidak hanya beroperasi di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, sehingga membentuk jaringan kekuasaan yang saling terhubung.

A. Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Kekuasaan

Bagian ini menyoroti bagaimana relasi antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami perubahan. Secara formal, desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk mengelola urusan sendiri. Namun dalam praktiknya, pemerintah pusat masih memegang kendali pada sektor-sektor strategis melalui regulasi tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desentralisasi tidak sepenuhnya menghilangkan pola sentralisasi, melainkan justru menciptakan bentuk baru dari kontrol pusat yang lebih tidak langsung (Indriani, 2021).

Pelaksanaan desentralisasi tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan awal. Dalam beberapa kasus, pemerintah pusat masih mempertahankan pengaruhnya, terutama pada sektor-sektor yang dianggap strategis seperti sumber daya alam, fiskal, dan kebijakan pembangunan nasional. Pengaruh ini tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi sering kali hadir dalam bentuk regulasi, standar nasional, atau mekanisme pengawasan yang membuat ruang gerak daerah menjadi terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia cenderung bersifat “setengah jalan” (Rohmandar, 2025). Di satu sisi, daerah memang memiliki kewenangan formal yang lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Namun di sisi lain, pemerintah pusat tetap memiliki alat untuk mengendalikan arah kebijakan secara keseluruhan.

Dengan kata lain, kekuasaan tidak sepenuhnya berpindah ke daerah, melainkan hanya mengalami pergeseran bentuk.

Pola ini justru melahirkan dinamika baru dalam hubungan pusat dan daerah. Alih-alih terjadi pembagian kekuasaan yang jelas, yang muncul adalah relasi yang saling tarik-menarik. Daerah berupaya memaksimalkan otonomi yang dimiliki, sementara pusat berusaha menjaga konsistensi kebijakan nasional. Dalam konteks ini, desentralisasi tidak benar-benar menghapus sentralisasi, tetapi mengubah cara kerja sentralisasi itu sendiri menjadi lebih halus dan tidak selalu terlihat secara eksplisit (Nuraeni et al., 2025). Dari sudut pandang yang lebih kritis, kondisi ini bisa dipahami sebagai bentuk adaptasi dari sistem politik terhadap perubahan zaman. Pemerintah pusat tidak lagi menggunakan kontrol langsung seperti pada masa lalu, tetapi mengandalkan instrumen kebijakan untuk tetap mempertahankan pengaruhnya. Sementara itu, daerah juga tidak sepenuhnya bebas, karena masih berada dalam kerangka sistem nasional yang lebih besar.

B. Dominasi Elit dalam Struktur Politik

Penelitian menunjukkan bahwa elit politik memiliki posisi yang sangat kuat dalam sistem politik Indonesia. Dominasi ini terlihat dari penguasaan terhadap partai politik, proses pencalonan dalam pemilu, serta arah kebijakan publik. Elit tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi juga sebagai penentu utama dalam distribusi kekuasaan. Akibatnya, ruang partisipasi masyarakat menjadi terbatas dan sering kali bersifat simbolik (Pratama, 2025).

Salah satu bentuk dominasi yang paling terlihat ada pada partai politik. Secara ideal, partai seharusnya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun dalam kenyataannya, struktur internal partai sering kali dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki kendali atas keputusan strategis. Mulai dari penentuan calon legislatif, kandidat kepala daerah, hingga arah koalisi politik, semuanya banyak ditentukan oleh elit partai (Dayani et al., 2025). Akibatnya, proses kaderisasi tidak selalu berjalan secara terbuka dan kompetitif, tetapi lebih dipengaruhi oleh kedekatan, loyalitas, atau bahkan kekuatan finansial.

Dominasi elit juga tampak jelas dalam proses pemilihan umum. Meskipun pemilu dilaksanakan secara langsung dan terbuka, kesempatan untuk maju sebagai kandidat tidak sepenuhnya setara. Banyak calon harus melalui mekanisme internal partai yang cenderung tertutup, sehingga hanya mereka yang memiliki dukungan elit yang bisa maju. Dalam kondisi seperti ini, pemilu memang tetap berlangsung secara demokratis di permukaan, tetapi pilihan yang tersedia bagi masyarakat sebenarnya sudah “disaring” sebelumnya oleh elit politik (Rahmawati, n.d.).

Pengaruh elit tidak berhenti pada tahap pencalonan, tetapi juga berlanjut dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan publik yang dihasilkan sering kali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini terjadi karena elit memiliki kemampuan untuk mempengaruhi agenda politik, baik melalui posisi formal di pemerintahan maupun melalui jaringan informal yang mereka miliki. Dampak dari kondisi ini cukup signifikan terhadap kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat memang tetap ada, misalnya melalui pemilu atau forum-forum public (Isfironi et al., 2025). Namun, partisipasi tersebut sering kali bersifat simbolik karena ruang pengambilan keputusan yang sebenarnya masih berada di tangan elit. Dengan kata lain, masyarakat terlibat dalam proses, tetapi tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil akhir.

C. Kualitas Demokrasi: Antara Prosedural dan Substantif

Demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan, terutama dalam hal penyelenggaraan pemilu dan kebebasan politik. Namun jika dilihat secara substantif, kualitas demokrasi masih menghadapi tantangan. Proses politik yang seharusnya mencerminkan aspirasi publik sering kali terdistorsi oleh kepentingan elit. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara praktik demokrasi di atas kertas dan realitas yang terjadi di lapangan. gambaran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Riawan, 2020). Demokrasi yang berjalan sering kali masih berhenti pada level prosedural, yaitu sebatas memenuhi mekanisme formal seperti pemilu dan aturan kelembagaan. Sementara itu, aspek yang lebih mendasar seperti sejauh mana kebijakan benar-benar mewakili kepentingan Masyarakat masih menjadi persoalan. Di sinilah muncul perbedaan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Proses politik kerap tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kelompok tertentu. Kepentingan elit politik sering kali ikut menentukan arah kebijakan, bahkan sejak tahap awal perumusan agenda. Akibatnya, isu-isu yang diangkat dalam ruang publik tidak selalu mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang lebih sempit. Kondisi ini membuat demokrasi terlihat berjalan, tetapi tidak sepenuhnya menghasilkan keputusan yang inklusif (Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam politik juga sering kali bersifat terbatas. Memang benar bahwa masyarakat memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, tetapi setelah itu, ruang untuk mempengaruhi kebijakan menjadi semakin sempit. Proses pengambilan keputusan cenderung berlangsung di lingkaran elit, sehingga suara publik tidak selalu memiliki dampak yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, partisipasi yang ada lebih terlihat sebagai formalitas daripada sebagai kekuatan yang benar-benar menentukan (Amzal, 2025). Kesenjangan antara apa yang tertulis dalam aturan dan apa yang terjadi di lapangan menjadi salah satu ciri utama dari kondisi ini. Secara normatif, demokrasi menjanjikan pemerintahan yang responsif dan representatif. Namun dalam kenyataannya, masih ada jarak antara harapan tersebut dengan realitas yang ada. Demokrasi seolah berjalan di dua jalur: satu jalur formal yang terlihat rapi di atas kertas, dan satu jalur praktis yang dipenuhi dengan kompromi, negosiasi, serta kepentingan politik.

D. Relasi Kekuasaan antara Pusat dan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak selalu berjalan harmonis. Terdapat kecenderungan tarik-menarik kepentingan, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan kewenangan administratif. Di satu sisi, daerah menuntut otonomi yang lebih luas. Di sisi lain, pemerintah pusat berupaya mempertahankan kontrol untuk menjaga stabilitas dan konsistensi kebijakan nasional. Relasi ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks dan terus berkembang (Umam et al., 2025). Ketegangan ini paling sering muncul dalam pengelolaan sumber daya dan kewenangan administratif. Banyak daerah, terutama yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, ingin memperoleh porsi yang lebih luas dalam pengelolaannya. Mereka berargumen bahwa daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga lebih layak untuk menentukan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah pusat sering kali melihat hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda, yakni pentingnya menjaga distribusi yang merata serta kepentingan nasional secara keseluruhan.

Persoalan kewenangan administratif juga menjadi sumber perdebatan yang tidak kalah penting. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dianggap terlalu membatasi ruang gerak daerah. Misalnya, adanya regulasi yang mengatur secara rinci bidang tertentu membuat pemerintah daerah tidak leluasa mengambil keputusan. Sebaliknya, dari perspektif pusat, pengaturan tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan yang terlalu jauh antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas nasional (Sembiring, 2025).

Relasi ini sebenarnya bukan sekadar soal siapa yang lebih berkuasa, tetapi lebih pada bagaimana kekuasaan itu dibagi dan dijalankan. Pusat berusaha mempertahankan kendali untuk menjaga kesatuan dan arah kebijakan nasional, sementara daerah berupaya memperluas ruang otonomi agar bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Di titik inilah muncul negosiasi yang terus berlangsung, baik secara terbuka melalui kebijakan maupun secara tidak langsung melalui praktik politik sehari-hari (Benito Asdhie Kodiyat MS, 2021). Menariknya, dinamika ini juga menunjukkan bahwa desentralisasi tidak serta-merta menghapus dominasi pusat, tetapi justru mengubah bentuk interaksinya. Jika sebelumnya kontrol pusat bersifat langsung dan terpusat, sekarang lebih banyak dilakukan melalui mekanisme regulasi, koordinasi, dan pengawasan. Sementara itu, daerah juga tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif, karena memiliki ruang untuk bernegosiasi dan bahkan dalam beberapa kasus mampu mendorong kebijakan yang lebih menguntungkan bagi wilayahnya.

E. Implikasi terhadap Arah Transformasi Politik Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi sistem politik Indonesia masih berada dalam tahap yang belum sepenuhnya matang. Sentralisasi kekuasaan dan dominasi elit menjadi dua faktor utama yang mempengaruhi arah perubahan tersebut. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka demokrasi berpotensi berjalan secara formal tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas representasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat institusi politik, meningkatkan transparansi, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi Masyarakat (Abdullah, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi sistem politik Indonesia belum sepenuhnya bergerak menuju arah desentralisasi yang substansial. Meskipun secara formal telah terjadi distribusi kewenangan melalui kebijakan otonomi daerah, dalam praktiknya masih terlihat kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat. Di saat yang sama, dominasi elit politik tetap menjadi faktor kunci yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung berjalan pada tataran prosedural, sementara kualitas substantifnya masih dibatasi oleh struktur kekuasaan yang tidak merata. Dengan demikian, terdapat hubungan yang cukup kuat antara sentralisasi kekuasaan dan peran elit dalam membentuk arah perkembangan sistem politik Indonesia.

Upaya memperkuat demokrasi tidak cukup hanya melalui perbaikan institusi formal, tetapi juga perlu menyentuh aspek distribusi kekuasaan dan akses politik yang lebih luas. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan mekanisme akuntabilitas, peningkatan transparansi dalam proses politik, serta pembukaan ruang partisipasi publik

yang lebih inklusif. Selain itu, reformasi internal partai politik juga menjadi penting agar tidak terus didominasi oleh kelompok elit tertentu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, sehingga sangat bergantung pada ketersediaan dan kedalaman sumber yang digunakan. Di samping itu, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji dinamika empiris di tingkat lokal secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, serta memperluas fokus pada studi kasus di daerah tertentu. Dengan demikian, pemahaman mengenai hubungan antara sentralisasi kekuasaan dan politik elit dapat digali lebih mendalam dan kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2025). *Reformasi Hukum dalam Cengkeraman Oligarki : Menelusuri Kesenjangan Legitimasi Konstitusional dan Kepentingan Elite*. 18(01), 85–100.
- Amzal, A. (2025). *Otoritarianisme world governance dalam serial anime one piece world governance authoritarianism in the one piece anime serial*. 6(1), 65–74.
- Benito Asdhie Kodiyat MS, A. (2021). *Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020 The Influence of Political Parties for Beginner Voting Political Education in the Election of Mayors of Medan City in 2020*. 8(1), 101–112.
- Bustomi, A. R., Sugianto, D. A., & Juniawan, F. Z. (2025). *Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat*. 4(1), 89–100.
- Dayani, S. R., Rohayati, T., & Sujana, A. M. (2025). *Pemberontakan PRRI dan Permesta : Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama (1957-1958)*. 2(3), 441–454.
- Dinata, F. R. (2025). *Integrasi Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Manajemen Pendidikan Islam*. 1(2), 28–32.
- Fajriyah, I. A., Riskiyeh, L., Mufid, K., Islam, U., & Madura, N. (2025). *Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi Dan Sentralisasi Kekuasaan*. 13(9).
- Gunawan, R. (2026). *Continuity over Rupture: Elite Cartels and Democratic Recession in the Indonesian Transition Kontinuitas di Balik Wacana Perpecahan: Kartel Elit dan Regresi Demokrasi Indonesia*. 1(1), 11–25.
- Harun Ni'am, Ismiyatun, P. S. (2025). *Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024: Perspektif Komunikasi Politik*. 22(1), 128–149.
- Heryana, A. (2020). *Data dan Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Indriani, D. (2021). *Isu pemekaran wilayah sebagai komoditas politik dalam masyarakat to pulo di kabupaten selayar*. 1–23.
- Iriyani Astuti Arief , Indra Lestari, Y. S. (2023). *Kontestasi Wacana Politik Identitas*

- Dalam Ruang Digital Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara*. 6(4), 1311–1324.
- Isfironi, M., R, A. S., & Luthfy, R. M. (2025). *Budaya Politik & Demokrasi (Meruangkan Budaya Politik Unggul dan Menghidupkan Kembali Demokrasi Lokal)*. 04(1), 13–21.
- Nur Rahmad Teguh Septiyadi, N. H. (2025). *Politik Identitas dan Krisis Kebhinekaan: Perspektif Moral Kebangsaan Buya Syafii Maarif*. 25, 159–171.
- Nuraeni, W., Sangadah, A., & Zaman, M. F. (2025). *Islam Politik di Turki : Kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)*. 801–810.
- Pora, S., Kanuna, R. S., Muksin, D., Nofrima, S., & Priyanto, A. (2025). *Politik Mahar dan Sentralisasi Partai: Analisis Motif Dukungan PKB pada Pilkada Kepulauan Sula 2020*. 8(2), 118–130.
- Pratama, A. (2025). *Dampak Perubahan Ideologi Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia*. 3(7).
- Rahmawati, S. (n.d.). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi*. 4(2), 121–141.
- Riawan, O. D. (2020). *Dominasi Oligarki Dan Politik Dinasti Dalam Kandidasi Kepala Daerah Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Surakarta Tahun 2020*.
- Ridoi, A. (2024). Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(2), 361–384. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i2.30>
- Rohmandar, A. (2025). *Identifikasi Praktik Politik Kartel dan Kongkalikong di Indonesia: Analisis Komprehensif Terhadap Fenomena Oligarki Politik Kontemporer*. 02(01), 1990–1998.
- Sembiring, R. R. F. dan A. V. (2025). *Minimnya Peran Substantif Dpr Dalam Rppjn Terhadap Keseimbangan Kekuasaan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. 4(2), 110–125.
- Sihombing, R. S. T., Kartika, A. T., Sitompul, Y. S., & Yoseph Anugerah, A. R. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19(1), 81–96. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658>
- Siregar, J. P., Sari, K. E., & Mariami, I. (2022). Representasi dari Faktor-Faktor Pembentuk Identitas Tempat pada Kampung Kemasan, Gresik. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(1), 35–44. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i1.35881>
- Sony Eko Adisaputro. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>
- Sotya, S., Adhitya, Dhiauryani, C., & Fevriera, N. (2022). *Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis*. 1(November), 16–36.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D*. ALFABETA CV. Timur Tumanggor, A. A. A. (2025). *Politik Identitas dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial*. 6(2), 1417–1426.
- Umam, F., Wulanah, K., Amanda, S. N., & Faturangga, D. A. (2025). *Kemunduran Kesultanan Mataram Islam: Analisis Dinamika Kekuasaan Perspektif Ibnu Khaldun* *The Decline of The Islamic Mataram Sultanate: Analysis of Power Dynamics from Ibn Khaldun's Perspective*. 22–38. <https://doi.org/10.22515/isnad.v6i01.11939>
- Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, J. S. C. (2025). *Sentralisasi kekuasaan di parlemen: implikasi dominasi suara fraksi terhadap demokrasi perwakilan di indonesia*. 3, 163–177.